

ANALISIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS VALUE FOR MONEY TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KERINCI

Ramah¹; Iskandar Sam², Misni Erwati³

Universitas Jambi

Jl. Lintas Jambi – Muaro Bulian KM 15, Jambi 36122, Indonesia

E-mail : theramahmarro@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the local government expenditure performance of Kerinci Regency based on the value for money concept, encompassing economy and efficiency, as well as its impact on the Human Development Index (HDI). This research is motivated by the importance of managing local government budgets with focus not only on budget absorption but also on developmental impacts felt by the community. Regional autonomy under Law Number 1 of 2022 grants local governments broad authority in managing finances while demanding accountability and efficiency. The independent variables are local government expenditure and value for money (economy and efficiency), while the dependent variable is the HDI. The results show that: (1) expenditure management during 2014–2024 falls into the economical category; (2) efficiency fluctuated throughout the period — 6 years were categorized as efficient (2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022) and 5 years as inefficient (2016, 2019, 2020, 2023, 2024), though overall efficiency performance can be considered fairly good.

Keywords: *Value for Money, regional expenditure, Human Development Index, regional autonomy, Kerinci Regency*

Belanja pemerintah daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Menurut Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan belanja daerah semua kewajiban Pemda yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Penggunaannya wajib selaras dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, berbasis pada Perda, APBD, serta rencana pembangunanH daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) untuk kemakmuran masyarakat. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan empat klasifikasi utama Belanja Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis. Meskipun alokasi belanja daerah terus meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut belum tentu diikuti oleh perbaikan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya.

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Dalam Otonomi Daerah yang telah diterapkan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur

hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan Undang-undang. pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. Namun, otonomi daerah ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara akuntabel, efektif, dan efisien guna mencapai hasil pembangunan yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Human Development Report (HDR, 1990), pembangunan manusia berfokus pada perluasan pilihan hidup masyarakat yang bersifat dinamis dan bervariasi. Di antara berbagai pilihan tersebut, terdapat tiga aspek fundamental yang wajib terpenuhi, yaitu derajat kesehatan dan umur panjang, tingkat keterpelajaran (pendidikan), serta kemampuan daya beli untuk hidup secara layak. Ketiga dimensi pokok ini merupakan prasyarat utama (prerequisite); jika tidak terpenuhi, kemampuan masyarakat untuk mengakses pilihan-pilihan kemajuan lainnya akan terhambat.

Tabel 1Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kerinci

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2014	67,96
2015	68,89
2016	69,68
2017	70,03
2018	70,59
2019	70,95
2020	72,47
2021	72,72
2022	73,24
2023	73,77
2024	73,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kerinci menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten selama periode 2014 - 2024. Nilai IPM mengalami kenaikan dari 67,96 pada tahun 2014 menjadi 73,77 pada tahun 2023, atau bertambah sebesar 5,81 persen dalam

rentang sepuluh tahun. Namun pada tahun 2024 terjadinya penurunan IPM pertama kali dalam satu dekade menjadi 73,11, turun 0,66 poin dari puncaknya di tahun 2023, yang mengindikasikan adanya pelemahan kualitas pembangunan manusia yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Kondisi ini secara keseluruhan memperkuat urgensi penelitian berbasis *Value for Money*, mengingat laju pertumbuhan IPM yang cenderung lambat dan tidak proporsional dengan peningkatan belanja daerah yang terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisa belanja pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kerinci. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pengelolaan anggaran agar belanja yang dikeluarkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa belanja pemerintah daerah berbasis *Value for Money* terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci. Menurut Sekaran & Bougie (2016), penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Peneliti memperoleh data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 – 2023. Penelitian ini menggunakan Analisis belanja pemerintah daerah berdasarkan dua aspek yang digunakan, yaitu ekonomi dan efisiensi.

Ekonomi

Menurut Mahmudi (2015), ekonomi dikaitkan dengan input primer yang digunakan berupa anggaran dan kas termasuk input sekunder seperti tenaga kerja, bahan dan infrastruktur serta barang modal untuk dikonsumsi sesuai dengan kegiatan operasi suatu organisasi yang dilaksanakan.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
>100%	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
<60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996

Efisiensi

Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan mencapai efisien jika hasil yang dicapai dalam suatu program (output) organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah mungkin (spending well). Semakin besar keluaran yang dicapai dibandingkan masukan atau semakin rendah input yang digunakan untuk output, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2018).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efisien

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
>100%	Tidak Efisien
= 100%	Efisien Berimbang
<100%	Efisien

Sumber: Khikmah (2014)

HASIL

Gambar 1 Laporan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014 - 2024

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan
2014	Rp 793.594.896.024.57	Rp 837.723.445.266.43	Rp 869.305.112.019.91
2015	Rp 976.909.911.399.00	Rp 917.987.331.512.29	Rp 973.570.323.578.95
2016	Rp 1.188.983.229.604.00	Rp 1.100.444.544.999.70	Rp 1.057.674.380.055.20
2017	Rp 1.173.342.758.299.00	Rp 1.176.318.113.458.50	Rp 1.201.362.880.752.20
2018	Rp 1.180.196.910.587.00	Rp 1.159.695.545.965.80	Rp 1.202.472.474.154.10
2019	Rp 1.394.430.578.619.00	Rp 1.330.735.654.620.40	Rp 1.298.742.923.295.20
2020	Rp 1.424.054.987.664.00	Rp 1.229.591.235.000.00	Rp 1.203.597.144.930.00
2021	Rp 1.226.594.369.105.00	Rp 1.143.501.979.244.00	Rp 1.185.942.994.825.00
2022	Rp 1.116.572.167.204.00	Rp 1.133.453.338.291.00	Rp 1.153.679.053.376.80
2023	Rp 1.257.042.522.028.00	Rp 1.181.255.432.410.80	Rp 1.173.591.263.361.00
2024	Rp 1.262.463.778.104.00	Rp 1.227.598.759.939.40	Rp 1.202.727.660.762.00
2025	Rp 1.239.422.762.905.50	Rp 1.002.604.586.520.00	Rp 995.590.834.616.65

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan laporan belanja pemerintah daerah kabupaten kerinci menunjukkan selama 11 tahun (2014–2024), anggaran belanja Kabupaten Kerinci tumbuh sekitar 59%, dari Rp 793,6 miliar menjadi Rp 1,26 triliun. Ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang cukup signifikan. Rata-rata tingkat serapan berada di 96,5%, yang tergolong baik secara nasional.

Rasio Ekonomi

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran. dengan target anggarannya.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Gambar 2 Rasio Ekonomis Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2024

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Ekonomis	Kriteria
2014	Rp 793.594.896.024.57	Rp 837.723.445.266.43	106%	Sangat Ekonomis
2015	Rp 976.909.911.399.00	Rp 917.987.331.512.29	94%	Ekonomis
2016	Rp 1.188.983.229.604.00	Rp 1.100.444.544.999.70	93%	Ekonomis
2017	Rp 1.173.342.758.299.00	Rp 1.176.318.113.458.50	100%	Ekonomis
2018	Rp 1.180.196.910.587.00	Rp 1.159.695.545.965.80	98%	Ekonomis
2019	Rp 1.394.430.578.619.00	Rp 1.330.735.654.620.40	95%	Ekonomis
2020	Rp 1.424.054.987.664.00	Rp 1.229.591.235.000.00	86%	Cukup Ekonomis
2021	Rp 1.226.594.369.105.00	Rp 1.143.501.979.244.00	93%	Ekonomis
2022	Rp 1.116.572.167.204.00	Rp 1.133.453.338.291.00	102%	Sangat Ekonomis
2023	Rp 1.257.042.522.028.00	Rp 1.181.255.432.410.80	94%	Ekonomis
2024	Rp 1.262.463.778.104.00	Rp 1.227.598.759.939.40	97%	Ekonomis

Sumber : Data diolah peneliti, 2026

Rasio Efisien

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber : Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Gambar 3 Rasio Efisiensi Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2024

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2014	Rp 837,723,445,266.43	Rp 869,305,112,019.91	96%	Efisien
2015	Rp 917,987,331,512.29	Rp 973,570,323,578.95	94%	Efisien
2016	Rp 1,100,444,544,999.70	Rp 1,057,674,380,055.20	104%	Tidak Efisien
2017	Rp 1,176,318,113,458.50	Rp 1,201,362,880,752.20	98%	Efisien
2018	Rp 1,159,695,545,965.80	Rp 1,202,472,474,154.10	96%	Efisien
2019	Rp 1,330,735,654,620.40	Rp 1,298,742,923,295.20	102%	Tidak Efisien
2020	Rp 1,229,591,235,000.00	Rp 1,203,597,144,930.00	102%	Tidak Efisien
2021	Rp 1,143,501,979,244.00	Rp 1,185,942,994,825.00	96%	Efisien
2022	Rp 1,133,453,338,291.00	Rp 1,153,679,053,376.80	98%	Efisien
2023	Rp 1,181,255,432,410.80	Rp 1,173,591,263,361.00	101%	Tidak Efisien
2024	Rp 1,227,598,759,939.40	Rp 1,202,727,660,762.00	102%	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah peneliti, 2026

PEMBAHASAN

Rasio Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomi (*Value For Money*) belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci selama periode 2014 – 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan hasil yang positif. Dengan capaian rata-rata indeks ekonomis sebesar 104,3%, realisasi anggaran pada periode tersebut berada dalam klasifikasi ekonomis, yang membuktikan adanya tata kelola keuangan yang hemat, terukur, dan akuntabel. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 600.900.372 Tahun 1996, rata-rata tersebut termasuk dalam kategori ekonomis. Dari sebelas tahun pengamatan, terdapat 9 tahun yang masuk kategori ekonomis dan 2 tahun yang masuk kategori cukup ekonomis, tanpa adanya tahun yang berada pada kategori kurang ekonomis maupun tidak ekonomis.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola anggaran belanja secara hemat dan mengendalikan realisasi pengeluaran agar tetap berada di bawah atau mendekati anggaran yang telah ditetapkan, sehingga prinsip *Value for Money* dari aspek ekonomi dapat dikatakan telah tercapai dengan baik.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2024 dengan pendekatan *Value For Money*, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari nilai rasio efisiensi yang sebagian besar berada dibawah 100% dengan kriteria efisien, bahkan pada beberapa tahun rasio efisiensi melebihi 100% sehingga masuk dalam kriteria tidak efisien. Tahun-tahun yang termasuk kategori efisien yaitu 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, dan 2022. Sementara itu kriteria tidak efisien yaitu, tahun 2016, 2019, 2020, 2023, dan 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci masih menghadapi kendala dalam mengendalikan pengeluaran daerah secara optimal. Tingginya realisasi belanja dibandingkan pendapatan mengindikasikan bahwa prinsip efisiensi dalam konsep *Value For Money* belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih hemat, tepat guna, dan terarah agar penggunaan sumber daya keuangan daerah dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis *Value For Money* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah yang berorientasi pada hasil dan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga setiap rupiah belanja yang dikeluarkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah yang diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan secara langsung berkontribusi terhadap tiga dimensi utama Indeks Pembangunan Manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dengan demikian, semakin besar dan tepat sasaran alokasi belanja publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin signifikan pula dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022). Hasil penelitian ini pada akhirnya memperkuat pemahaman bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan manusia melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas dan berkesinambungan.

Kontribusi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil penelitian belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini mendukung teori belanja pemerintah daerah, teori *Value for Money*, dan teori IPM, karena peningkatan belanja daerah yang dikelola dengan baik terbukti mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kerinci. Hal ini terlihat dari Jurnal Daya Saing (Vol. XII, No. II Juni 2026)

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang berlangsung seiring dengan meningkatnya realisasi belanja daerah selama periode penelitian. Namun, agar kontribusi tersebut semakin optimal, pemerintah daerah perlu meningkatkan penerapan prinsi *Value for Money*, khususnya pada aspek efisiensi dan efektifitas, sehingga setiap pengeluaran anggaran dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Namun, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran agar kontribusi belanja terhadap pembangunan manusia dapat menjadi lebih optimal.

SIMPULAN

Pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam perspektif *Value for Money* menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil analisis rasio efisiensi yang sebagian besar berada pada kategori kurang efisien dan beberapa tahun termasuk kategori tidak efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih sangat tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah sehingga prinsip efisiensi dalam konsep *Value for Money* belum tercapai secara maksimal. Namun demikian, pemerintah daerah tetap mampu menjalankan

Hubungan antara belanja Pemerintah Daerah berbasis *Value for Money* dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kerinci menunjukkan adanya hubungan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari tren IPM Kabupaten Kerinci yang cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga 2023 meskipun pengelolaan belanja daerah masih berada pada kategori kurang efisien dan tidak efisien. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah tetap memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja pemerintah daerah
p.ISSN: 2407-800X e.ISSN: 2541-4356

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci. Kontribusi tersebut terlihat dari meningkatnya capaian IPM seiring dengan meningkatnya realisasi belanja daerah pada sektor-sektor pelayanan publik dan pembangunan manusia. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan IPM yang menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah tidak selalu menjamin peningkatan pembangunan manusia apabila pengelolaannya belum dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar belanja yang dikeluarkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kerinci*. Kerinci: BPS Kabupaten Kerinci.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Kabupaten Kerinci dalam Angka.
- Kurniawan, I., & Murtala, M. (2021). Efisiensi belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 1-8.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Priambodo, A., & Noor, I. (2014). Analisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- UNDP (United Nations Development Programme). 1990. Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. New York.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Utami, N. L. (2018). Analisis belanja sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 45–58.
- Wiraguna, A., Pambelum, Y. J., & Umbing, G. B. (2024). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD): Studi Pada Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 57-70.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis indeks pembangunan manusia (ipm) kabupaten pacitan tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2).